



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONI ARDIANTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN
3. NHK : 116535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.098.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA
TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 677 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 556 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 756 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 23.000.000
5. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
6. Tanah Seluas 545 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **132.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



7.000.000

4. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 613.100.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.855.601.000

III. HUTANG

Rp. 23.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.832.601.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.